

**BADAN
PENGELOLA
PERBATASAN
DAERAH**



**LAPORAN
KEUANGAN**

2025

DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab.....	v
Ringkasan Eksekutif.....	vi
A. Catatan atas Laporan Keuangan.....	6
I. Pendahuluan	6
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD.....	6
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD.....	8
II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD OPD.....	8
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	9
2.2 Kebijakan Keuangan.....	9
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Badan Pengelola Perbatasan Daerah.....	10
III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD.....	10
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD.....	11
3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	12
IV. Kebijakan Akuntansi.....	13
4.1 Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah OPD	13
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Kebijakan Akuntansi	14

V.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD.....	14
5.1	Laporan Realisasi Anggaran.....	14
a.	Pendapatan – LRA.....	15
b.	Belanja – LRA.....	16
c.	Surplus/Defisit.....	16
5.2	Laporan Operasional.....	19
a.	Pendapatan – LO.....	19
b.	Beban – LO.....	19
c.	Surplus/Defisit.....	20
5.3	Laporan Perubahan Ekuitas.....	20
5.4	Neraca.....	21
1.	Aset.....	22
a.	Aset Lancar.....	22
b.	Investasi Jangka Panjang.....	23
c.	Aset Tetap.....	24
d.	Aset Lainnya.....	26
2.	Kewajiban.....	27
1.	Kewajiban Jangka Pendek.....	27
2.	Kewajiban Jangka Panjang.....	27
3.	Ekuitas.....	27
	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.....	28
	Penutup.....	39

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. N e r a c a;
5. Catatan atas Laporan Keuangan .

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 22 Januari 2026

**Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,**



**Drs.H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berkewajiban antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan perangkat daerah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada OPD.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 dari pagu anggaran sejumlah Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari jumlah pagu anggarannya, dan/atau tidak ada realisasi pendapatan karena Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau bukanlah OPD yang memiliki target pendapatan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 6.129.768.952,00 dari pagu anggaran sejumlah Rp 6.712.957.924,00 atau mencapai 91,31% dari jumlah pagu anggarannya.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menggambarkan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan, mencakup unsur-unsur Pendapatan-LO dan Beban. Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp0,00 atau terdapat kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dari tahun sebelumnya, dan/atau tidak ada realisasi pendapatan karena Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau bukanlah OPD yang memiliki target pendapatan.

Realisasi beban pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 6.345.214.445,37 Realisasi Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp7.058.770.420,56 atau terdapat Penurunan sebesar Rp 713.555.975,19 atau 10,11% dari tahun sebelumnya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas akhir.

▪ Ekuitas Awal	Rp.	730.650.388,16
▪ Surplus/Defisit – LO	Rp.	(6.345.214.445,37)
▪ Koreksi Ekuitas	Rp.	0,00
▪ Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	Rp.	6.129.768.952,00
▪ Ekuitas Akhir	Rp.	515.204.894,79

4. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp918.133.465,00 yang terdiri atas:

▪ Aset Tetap	Rp.	488.835.640,29
▪ Investasi Jangka Panjang	Rp.	0,00
▪ Aset Lainnya	Rp.	0,00

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menggambarkan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan, mencakup unsur-unsur Pendapatan-LO dan Beban. Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp0,00 atau terdapat kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dari tahun sebelumnya, dan/atau tidak ada realisasi pendapatan karena Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau bukanlah OPD yang memiliki target pendapatan. Realisasi beban pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 6.345.214.445,37 Realisasi Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp7.058.770.420,56 atau terdapat Penurunan sebesar Rp 713.555.975,19 atau 10,11% dari tahun sebelumnya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas akhir.

▪ Ekuitas Awal	Rp.	730.650.388,16
▪ Surplus/Defisit – LO	Rp.	(6.345.214.445,37)
▪ Koreksi Ekuitas	Rp.	0,00
▪ Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	Rp.	6.129.768.952,00
▪ Ekuitas Akhir	Rp.	515.204.894,79

4. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp918.133.465,00 yang terdiri atas:

▪ Aset Tetap	Rp.	488.835.640,29
▪ Investasi Jangka Panjang	Rp.	0,00
▪ Aset Lainnya	Rp.	0,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri atas :

▪ Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	0,00
▪ Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	0,00

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Untuk laporan neraca, perubahan ekuitas akan disesuaikan kembali setelah perhitungan beban penyusutan dan bidang aset Provinsi Kepulauan Riau.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2025 ini, kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

I. Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dan juga menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan evaluasi keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;



- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;



- l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
- m. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
- n. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Kebijakan Akuntansi serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.



II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau berupa daerah yang dikelilingi lautan dengan mata pencaharian penduduk yang beraneka ragam dan berbagai suku ada di Provinsi Kepulauan Riau

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa dilaksanakan, karena seluruh kebijakan keuangan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau baik dalam kebijakan penerimaan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki wewenang untuk menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada setiap tahun anggaran. Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target belanja adalah:

- a. Belanja Tidak Langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan penghasilan lainnya serta tambahan penghasilan PNSD yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamikan permasalahan yang timbul di masyarakat serta saran dari TAPD;



- c. Belanja barang dan jasa dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaan;

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Secara umum target dalam APBD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tercapai/tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026.

Untuk target Pendapatan-LRA dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 bisa dicapai sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% karena Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau bukanlah OPD yang melaksanakan kebijakan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan Target Belanja dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6.712.957.924,00 bisa dicapai sebesar 6.129.768.952,00 atau sebesar 91,31%, untuk Tahun Anggaran 2024 capaian realisasi belanja sebesar Rp. 6.876.027.694,00 atau sebesar 91,23% dari penjelasan ini terjadi peningkatan persentase dibandingkan dengan 2024

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 Realisasi Tahun 2022 sejumlah Rp0,00 atau terdapat kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dari tahun sebelumnya. Realisasi Beban pada Tahun Anggaran 2025



adalah sebesar Rp 6.345.214.445,37 Realisasi Tahun 2024 sejumlah Rp 7.058.770.420,56 atau terdapat penurunan besar sebesar Rp 713.555.975,19 atau 10,11% dari tahun sebelumnya.

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Realisasi APBD pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 1
Ikhtisar Realisasi - LRA Pencapaian Target Kinerja Keuangan
OPD

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
a.	Pendapatan-LRA	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31 %
c.	Surplus/Defisit	(6.712.957.924,00)	(6.129.768.952,00)	(91,31 %)
d.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(6.712.957.924,00)	(6.129.768.952,00)	(96,31 %)

Tabel diatas menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum. Realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.712.957.924,00 atau 91,31% dari anggaran sebesar Rp. 6.129.768.952,00



Tabel 2
Ikhtisar Realisasi – LO Pencapaian Target Kinerja Keuangan
OPD

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
a.	Pendapatan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Beban – LO	6.345.214.445,37	7.058.770.420,56	(713.555.975,19)	(10,11%)
c.	Surplus/Defisit	(6.345.214.445,37)	(7.058.770.420,56)	(713.555.975,19)	(10,11%)

Tabel diatas menggambarkan Realisasi Pendapatan - LO pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 Realisasi Tahun 2024 sejumlah Rp0,00 atau terdapat kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Realisasi Beban-LO pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 6.345.214.445,37 Realisasi Tahun 2024 sejumlah Rp 7.058.770.420,56 atau terdapat penurunan sebesar Rp713.555.975,19 atau 10,11% dari tahun sebelumnya .

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Selama Tahun Anggaran berjalan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target pendapatan, dikarenakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki wewenang dan kebijakan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam



peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dalam capaian target belanja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan tanpa ada kendala.

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah OPD

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu unit OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan 1 (satu) orang Pengguna Anggaran, yang merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 menggunakan basis aktual untuk neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan realisasi anggaran.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada nilai mata uang rupiah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, seluruh kegiatan telah dinilai



dengan rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Kebijakan Akuntansi

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 telah mengupayakan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024
a. Pendapatan-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan-LRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Atau tidak terdapat realisasi pendapatan karena LRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau bukanlah OPD yang menargetkan pendapatan pada setiap tahun anggaran.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Tahun 2024
b. Belanja-LRA	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31	6.876.027.694,00



Realisasi Belanja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.712.957.924,00 atau 91,31%. Sedangkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.876.027.694,00 .

Adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target belanja adalah sebagai berikut:

- 1. Memastikan kecukupan keuangan daerah di Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk, untuk membayar seluruh transaksi belanja yang dilakukan oleh masing-masing OPD;
- 2. Memastikan mata anggaran belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada saat pencairan tidak terdapat hambatan dalam verifikasi.

	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp) Tahun 2025	%	Tahun 2024 (Rp)
c. Surplus/Defisit -LRA	(6.712.957.924,00)	(6.129.768.952,00)	(91,31)	(6.876.027.694,00)

Rincian anggaran dan realisasi LRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 3
Belanja Operasional
Yang berakhir pada 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Operasi	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31	6.876.027.694,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 6.712.957.924,00 dengan realisasi sebesar Rp6.129.768.952,00 atau 91,31% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Operasi Berdasarkan Obyek Belanja
yang berakhir pada 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi Tahun 2024
Belanja Pegawai	5.651.131.020,94	5.139.971.973,00	90,95	5.348.677.461,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.885.360.718,94	1.717.273.720,00	91,08	1.683.232.948,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.765.770.302,00	3.422.698.253,00	90,89	3.461.780.513,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	203.664.000,00
Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.061.826.903,06	989.796.979,00	93,22	1.527.350.233,00



Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi Tahun 2024
Belanja Barang	182.876.464,00	151.524.741,00	82,86	242.958.582,00
Belanja Jasa	501.862.443,06	472.109.531,00	94,07	376.883.125,00
Belanja Pemeliharaan	2.880.000,00	1.234.234,00	42,86	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	374.207.996,00	364.928.473,00	97,52	907.508.526,00

Belanja Modal	0,00	0,00	00,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	00,00	0,00
Jumlah	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(91,31)	6.876.027.694

Tabel 5
Belanja Modal Berdasarkan Jenis Belanja
Yang berakhir pada 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024
Surplus/(Defisit)	(6.712.957.924,00)	(6.129.768.952,00)	91,31	(6.876.027.694,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Surplus/Defisit anggaran sebesar Rp (6.712.957.924,00) dengan realisasi Surplus/Defisit anggaran sebesar Rp (6.129.768.952,00)

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA)	(6.712.957.924,00)	(6.129.768.952,00)	91,31	(6.876.027.694,00)

SiLPA yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 583.188.972

5.2 Laporan Operasional

	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Pendapatan – LO	0,00	0,00	0,00	

Realisasi Pendapatan-LO Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00



Realisasi Tahun 2024 sejumlah Rp0,00 atau terdapat kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dari tahun sebelumnya. Atau tidak terdapat realisasi pendapatan karena Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau bukanlah OPD yang menargetkan pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
b. Beban – LO	6.345.214.445,37	7.058.770.420,56	(713.555.975,19)	(10,11)

Beban Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp 6.345.214.445,37 sedangkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sejumlah Rp 7.058.770.420,56 atau terdapat penurunan sebesar Rp 713.555.975,19 atau 10,11 %

Rincian realisasi Beban sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Beban Operasional Tahun Sebelumnya

Uraian	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	5.139.971.973,00	5.343.403.111,00	(203.431.138,00)	(3,81)
Beban Barang dan Jasa	990.593.560,17	1.500.718.397,33	(510.124.837,16)	(33,99)
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	214.648.912,20	214.648.912,23	(0,03)	(0,00)
Jumlah	6.345.214.445,37	7.058.770.420,56	(713.555.975,19)	(10,11)



	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
c. Surplus/ Defisit – LO	(6.345.214.445,37)	(7.058.770.420,56)	713.555.975,19	(10,11)

Realisasi atas Pendapatan-LO dan Beban Tahun Anggaran 2024 menghasilkan defisit sejumlah Rp(7.058.770.420,56) Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp(6.345.214.445,37)

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas akhir. Rincian perubahan ekuitas Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 7
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	730.650.388,16	913.393.115,00
Surplus/Defisit-LO	(6.345.214.445,37)	(6.871.287.344,00)



Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	6.129.768.952,00	6.876.027.694,00
Ekuitas Akhir	515.204.894,79	918.133.465,00

5.4 Neraca

Neraca Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan jumlah aset sebesar Rp. 515.204.894,79 kewajiban sebesar Rp 0,00

Penjelasan atas pos-pos neraca adalah, sebagai berikut :

1. Aset

a. Aset Lancar

Kas

Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.



	Tahun 2025	Tahun 2024
1. Kas di bendahara Pengeluaran	0,00	0.00
2. Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
3. Piutang	0.00	0.00

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah setelah tanggal neraca pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp0,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
1. Beban Dibayar Dimuka	0,00	466.666,67

Akun beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2024 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2025.



	Tahun 2025	Tahun 2024
2. Persediaan	58.885,50	388.800,00

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 berdasarkan *stock opname* pada LRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Rp 58.885,50.

B. Investastasi Jangka Panjang

	Tahun 2025	Tahun 2024
1. Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari:

C. Aset Tetap

	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Tetap	488.835.640,29	703.484.552,49



Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah Aset Tetap LRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 488.835.640,29 terdiri dari Belanja Modal Pada Kegiatan Rutinitas Perkantoran sebesar 488.835.640,29 sebagai berikut:

Tabel 8
Bertambah Berkurang Aset Tetap
Yang berakhir pada 31 Desember 2025

Nama Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.093.482.700,00	0,00	0,00	1.093.482.700,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(604.647.059,71)	(0,00)	0,00	(604.647.059,71)
Jumlah	488.835.640,29	0,00	0,00	488.835.640,29



Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp 488.835.640,29 (d disesuaikan dari Pengurus Barang) dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 9
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Yang berakhir pada 31 Desember 2025

No	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2025	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025
1	Peralatan dan Mesin	(389.998.147,51)	0,00	(604.647.059,71)
2	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Jalan, irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		(389.998.147,51)	0,00	(604.647.059,71)

i. Aset Lainnya

1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta tidak digunakan untuk menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset



Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Akumulasi amortisasi merupakan penyusutan pada aset lainnya (tidak berwujud) dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan amortisasi adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset lainnya. Akumulasi Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

2. Aset lain-lain

Aset Lain-lain yang merupakan reklasifikasi dari aset tetap dengan kondisi rusak berat/akan dicadangkan untuk dihapuskan/dilelang.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Nilai Kewajiban Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp0,00 yang terdiri dari:

i. Kewajiban Jangka Pendek

	Tahun 2025	Tahun 2024
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

ii. Kewajiban Jangka Panjang

	Tahun 2025	Tahun 2024
--	------------	------------



Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
--------------------------	------	------

c. EKUITAS

Ekuitas adalah Kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek.

EKUITAS AWAL	Rp	730.650.388,16
SURPLUS/DEFISIT – LO	Rp	(6.345.214.445,37)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN		
Koreksi Ekuitas	Rp	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
Koreksi Ekuitas Lain	Rp	0,00
KEWAJIBAN DIKONSOLIDASIKAN	Rp	6.129.768.952,00
EKUITAS AKHIR	Rp	515.204.894,79



PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dasar Hukum Pembentukan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pimpinan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Kepala Badan : **Drs. H. Dolly Boniara, M.Si**

Sekretaris : **Rosita, S.E, M.M**

Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 disahkan dengan peraturan daerah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.



PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Penyajian Laporan Keuangan masih terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Khususnya dan Daerah Perbatasan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya guna menuju masyarakat yang berakhlatulkarimah.

Tanjungpinang, 22 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs.H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003



LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	6.345.214.445,37	7.058.770.420,56	(713.555.975,19)	(10,11)
8.1	BEBAN OPERASI	6.130.565.533,17	6.844.121.508,33	(713.555.975,16)	(10,43)
8.1.01	Beban Pegawai	5.139.971.973,00	5.343.403.111,00	(203.431.138,00)	(3,81)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	990.593.560,17	1.500.718.397,33	(510.124.837,16)	(33,99)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	6.130.565.533,17	6.844.121.508,33	(713.555.975,16)	(10,43)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	214.648.912,20	214.648.912,23	(0,03)	(0,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	214.648.912,20	214.648.912,23	(0,03)	(0,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	214.648.912,20	214.648.912,23	(0,03)	(0,00)
	JUMLAH BEBAN	6.345.214.445,37	7.058.770.420,56	(713.555.975,19)	(10,11)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.345.214.445,37)	(7.058.770.420,56)	713.555.975,19	(10,11)

Tanjungpinang, 22 Januari 2026
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs.H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	6.345.214.445,37	7.058.770.420,56	(713.555.975,19)	(10,11)
8.1	BEBAN OPERASI	6.130.565.533,17	6.844.121.508,33	(713.555.975,16)	(10,43)
8.1.01	Beban Pegawai	5.139.971.973,00	5.343.403.111,00	(203.431.138,00)	(3,81)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.717.273.720,00	1.677.958.598,00	39.315.122,00	2,34
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.199.057.400,00	1.143.081.600,00	55.975.800,00	4,90
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.102.059.700,00	1.143.081.600,00	(41.021.900,00)	(3,59)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	96.997.700,00	0,00	96.997.700,00	100,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	113.781.494,00	122.775.714,00	(8.994.220,00)	(7,33)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	110.919.992,00	122.775.714,00	(11.855.722,00)	(9,66)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2.861.502,00	0,00	2.861.502,00	100,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	109.760.000,00	111.020.000,00	(1.260.000,00)	(1,13)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	109.760.000,00	111.020.000,00	(1.260.000,00)	(1,13)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	84.320.000,00	92.660.000,00	(8.340.000,00)	(9,00)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	84.320.000,00	92.660.000,00	(8.340.000,00)	(9,00)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.225.000,00	22.895.000,00	1.330.000,00	5,81
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.715.000,00	22.895.000,00	(5.180.000,00)	(22,63)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.510.000,00	0,00	6.510.000,00	100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	63.512.340,00	63.150.240,00	362.100,00	0,57
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	58.949.880,00	63.150.240,00	(4.200.360,00)	(6,65)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	4.562.460,00	0,00	4.562.460,00	100,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.502.029,00	7.464.178,00	(1.962.149,00)	(26,29)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.502.029,00	7.464.178,00	(1.962.149,00)	(26,29)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	16.992,00	14.050,00	2.942,00	20,94
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.293,00	14.050,00	243,00	1,73
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.699,00	0,00	2.699,00	100,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	107.121.392,00	105.501.155,00	1.620.237,00	1,54
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	102.850.618,00	105.501.155,00	(2.650.537,00)	(2,51)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.270.774,00	0,00	4.270.774,00	100,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.494.263,00	2.349.161,00	145.102,00	6,18
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.261.458,00	2.349.161,00	(87.703,00)	(3,73)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	232.805,00	0,00	232.805,00	100,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	7.482.810,00	7.047.500,00	435.310,00	6,18
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.784.424,00	7.047.500,00	(263.076,00)	(3,73)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	698.386,00	0,00	698.386,00	100,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.422.698.253,00	3.461.780.513,00	(39.082.260,00)	(1,13)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.561.894.096,00	1.560.126.901,00	1.767.195,00	0,11
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.561.894.096,00	1.560.126.901,00	1.767.195,00	0,11
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	378.345.615,00	389.183.352,00	(10.837.737,00)	(2,78)
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	378.345.615,00	389.183.352,00	(10.837.737,00)	(2,78)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.482.458.542,00	1.512.470.260,00	(30.011.718,00)	(1,98)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.482.458.542,00	1.512.470.260,00	(30.011.718,00)	(1,98)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	203.664.000,00	(203.664.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	203.664.000,00	(203.664.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	196.184.000,00	(196.184.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	7.480.000,00	(7.480.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	990.593.560,17	1.500.718.397,33	(510.124.837,16)	(33,99)
8.1.02.01	Beban Barang	151.854.655,50	243.103.782,00	(91.249.126,50)	(37,54)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	151.854.655,50	243.103.782,00	(91.249.126,50)	(37,54)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	432.000,00	(432.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.806.300,00	67.650.000,00	(2.843.700,00)	(4,20)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.130.400,00	1.136.000,00	994.400,00	87,54
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	6.200.000,00	(6.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.254.017,00	17.545.657,00	(7.291.640,00)	(41,56)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.223.723,50	15.444.300,00	(220.576,50)	(1,43)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.407.970,00	22.289.735,00	(2.881.765,00)	(12,93)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(25,00)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.474.365,00	19.810.140,00	(6.335.775,00)	(31,98)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.817.180,00	4.068.150,00	(1.250.970,00)	(30,75)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	422.000,00	0,00	422.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.896.100,00	3.444.000,00	452.100,00	13,13
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.967.600,00	208.600,00	3.759.000,00	1.802,01
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	6.556.200,00	(6.556.200,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.520.000,00	46.025.000,00	(37.505.000,00)	(81,49)
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.435.000,00	6.075.000,00	(640.000,00)	(10,53)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	24.219.000,00	(24.219.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	472.576.197,67	376.416.458,33	96.159.739,34	25,55
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	370.792.555,00	319.744.769,00	51.047.786,00	15,97
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	172.370.555,00	291.357.857,00	(118.987.302,00)	(40,84)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.500.000,00	18.000.000,00	(1.500.000,00)	(8,33)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.988.000,00	2.186.912,00	(198.912,00)	(9,10)
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	176.534.000,00	0,00	176.534.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0082	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.116.976,00	15.138.356,00	(7.021.380,00)	(46,38)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.116.976,00	13.337.764,00	(5.220.788,00)	(39,14)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	800.268,00	(800.268,00)	(100,00)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	1.000.324,00	(1.000.324,00)	(100,00)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	42.466.666,67	41.533.333,33	933.333,34	2,25
8.1.02.02.04.0115	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)	42.466.666,67	41.533.333,33	933.333,34	2,25
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00	100,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	1.234.234,00	0,00	1.234.234,00	100,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.234.234,00	0,00	1.234.234,00	100,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.234.234,00	0,00	1.234.234,00	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	364.928.473,00	881.198.157,00	(516.269.684,00)	(58,59)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350.371.683,00	881.198.157,00	(530.826.474,00)	(60,24)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	350.371.683,00	881.198.157,00	(530.826.474,00)	(60,24)
8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	14.556.790,00	0,00	14.556.790,00	100,00
8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	14.556.790,00	0,00	14.556.790,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	6.130.565.533,17	6.844.121.508,33	(713.555.975,16)	(10,43)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	214.648.912,20	214.648.912,23	(0,03)	(0,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	214.648.912,20	214.648.912,23	(0,03)	(0,00)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	214.648.912,20	214.648.912,23	(0,03)	(0,00)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	214.648.912,20	214.648.912,23	(0,03)	(0,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	214.648.912,20	214.648.912,23	(0,03)	(0,00)
	JUMLAH BEBAN	6.345.214.445,37	7.058.770.420,56	(713.555.975,19)	(10,11)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.345.214.445,37)	(7.058.770.420,56)	713.555.975,19	(10,11)

Tanjungpinang, 22 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs. H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	730.650.388,16	913.393.115,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(6.345.214.445,37)	(7.058.770.420,56)
RK PPKD	6.129.768.952,00	6.876.027.694,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	(0,28)
EKUITAS AKHIR	515.204.894,79	730.650.388,16

Tanjungpinang, 22 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs.H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
31 Desember 2024 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31	6.876.027.694,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31	6.876.027.694,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.651.131.020,94	5.139.971.973,00	90,95	5.348.677.461,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.826.903,06	989.796.979,00	93,22	1.527.350.233,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31	6.876.027.694,00
	JUMLAH BELANJA	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31	6.876.027.694,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.712.957.924,00)	(6.129.768.952,00)	91,31	(6.876.027.694,00)

Tanjungpinang, 22 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs. H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197207101992011003



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31	6.876.027.694,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31	6.876.027.694,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.651.131.020,94	5.139.971.973,00	90,95	5.348.677.461,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.885.360.718,94	1.717.273.720,00	91,08	1.683.232.948,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.283.177.042,50	1.199.057.400,00	93,44	1.143.081.600,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.186.179.342,50	1.102.059.700,00	92,91	1.143.081.600,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	96.997.700,00	96.997.700,00	100,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	129.849.342,00	113.781.494,00	87,63	122.775.714,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.240.936,00	110.919.992,00	90,00	122.775.714,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.608.406,00	2.861.502,00	43,30	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	114.800.000,00	109.760.000,00	95,61	111.020.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	114.800.000,00	109.760.000,00	95,61	111.020.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	100.100.000,00	84.320.000,00	84,24	92.660.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	100.100.000,00	84.320.000,00	84,24	92.660.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.290.000,00	24.225.000,00	99,73	22.895.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.780.000,00	17.715.000,00	99,63	22.895.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.510.000,00	6.510.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	70.464.660,00	63.512.340,00	90,13	63.150.240,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.164.120,00	58.949.880,00	91,87	63.150.240,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.300.540,00	4.562.460,00	72,41	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.727.710,00	5.502.029,00	13,51	7.464.178,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.727.710,00	5.502.029,00	13,51	7.464.178,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.442,00	16.992,00	92,14	14.050,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.609,00	14.293,00	91,57	14.050,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.833,00	2.699,00	95,27	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	111.146.497,44	107.121.392,00	96,38	110.775.505,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	106.741.853,20	102.850.618,00	96,35	110.775.505,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.404.644,24	4.270.774,00	96,96	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.696.726,00	2.494.263,00	92,49	2.349.161,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.463.921,00	2.261.458,00	91,78	2.349.161,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	232.805,00	232.805,00	100,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.090.299,00	7.482.810,00	92,49	7.047.500,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.391.913,00	6.784.424,00	91,78	7.047.500,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	698.386,00	698.386,00	100,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.765.770.302,00	3.422.698.253,00	90,89	3.461.780.513,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.696.113.648,00	1.561.894.096,00	92,09	1.560.126.901,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.696.113.648,00	1.561.894.096,00	92,09	1.560.126.901,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	422.521.028,00	378.345.615,00	89,54	389.183.352,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	422.521.028,00	378.345.615,00	89,54	389.183.352,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.647.135.626,00	1.482.458.542,00	90,00	1.512.470.260,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.647.135.626,00	1.482.458.542,00	90,00	1.512.470.260,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	203.664.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	203.664.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	196.184.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.826.903,06	989.796.979,00	93,22	1.527.350.233,00
5.1.02.01	Belanja Barang	182.876.464,00	151.524.741,00	82,86	242.958.582,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	182.876.464,00	151.524.741,00	82,86	242.958.582,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	432.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.961.742,00	64.806.300,00	99,76	67.650.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.229.546,00	2.130.400,00	95,55	1.136.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.247.451,00	10.254.017,00	83,72	17.545.657,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.571.083,00	14.893.809,00	80,20	15.299.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.953.923,00	19.407.970,00	64,79	22.289.735,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.182.404,00	1.500.000,00	68,73	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	134.621,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.740.380,00	13.474.365,00	68,26	19.810.140,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.054.715,00	2.817.180,00	34,98	4.068.150,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	551.448,00	422.000,00	76,53	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.997.998,00	3.896.100,00	97,45	3.444.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.176.153,00	3.967.600,00	95,01	208.600,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.556.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.560.000,00	8.520.000,00	80,68	46.025.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.515.000,00	5.435.000,00	98,55	6.075.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	24.219.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	501.862.443,06	472.109.531,00	94,07	376.883.125,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	400.545.467,06	370.792.555,00	92,57	319.744.769,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	172.370.555,00	172.370.555,00	100,00	291.357.857,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	16.500.000,00	91,67	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.186.912,00	1.988.000,00	90,90	2.186.912,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	204.588.000,06	176.534.000,00	86,29	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.116.976,00	8.116.976,00	100,00	15.138.356,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.116.976,00	8.116.976,00	100,00	13.337.764,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	800.268,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	1.000.324,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	42.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	51.200.000,00	51.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	51.200.000,00	51.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.880.000,00	1.234.234,00	42,86	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.880.000,00	1.234.234,00	42,86	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.880.000,00	1.234.234,00	42,86	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	374.207.996,00	364.928.473,00	97,52	907.508.526,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	359.628.316,00	350.371.683,00	97,43	907.508.526,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	359.628.316,00	350.371.683,00	97,43	907.508.526,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	14.579.680,00	14.556.790,00	99,84	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa ¹ Luar Negeri	14.579.680,00	14.556.790,00	99,84	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31	6.876.027.694,00
	JUMLAH BELANJA	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	91,31	6.876.027.694,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.712.957.924,00)	(6.129.768.952,00)	91,31	(6.876.027.694,00)

Tanjungpinang, 22 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs.H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	515.204.894,79	730.650.388,16
1.1	ASET LANCAR	58.885,50	855.466,67
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	466.666,67
1.1.12	Persediaan	58.885,50	388.800,00
	JUMLAH ASET LANCAR	58.885,50	855.466,67
1.3	ASET TETAP	488.835.640,29	703.484.552,49
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.093.482.700,00	1.093.482.700,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(604.647.059,71)	(389.998.147,51)
	JUMLAH ASET TETAP	488.835.640,29	703.484.552,49
1.5	ASET LAINNYA	26.310.369,00	26.310.369,00
1.5.04	Aset Lain-lain	26.310.369,00	26.310.369,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	26.310.369,00	26.310.369,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	515.204.894,79	730.650.388,16
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	515.204.894,79	730.650.388,16
3.1	EKUITAS	515.204.894,79	730.650.388,16
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(6.345.214.445,37)	(7.058.770.420,56)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.129.768.952,00	6.876.027.694,00
	JUMLAH EKUITAS	515.204.894,79	730.650.388,16
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	515.204.894,79	730.650.388,16

Tanjungpinang, 22 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs. H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197207101992011003



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	515.204.894,79	730.650.388,16
1.1	ASET LANCAR	58.885,50	855.466,67
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	466.666,67
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	0,00	466.666,67
1.1.11.02.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	466.666,67
1.1.11.02.02.0115	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	466.666,67
1.1.12	Persediaan	58.885,50	388.800,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	58.885,50	388.800,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	58.885,50	388.800,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	58.885,50	388.800,00
	JUMLAH ASET LANCAR	58.885,50	855.466,67
1.3	ASET TETAP	488.835.640,29	703.484.552,49
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.093.482.700,00	1.093.482.700,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	446.800.000,00	446.800.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	446.800.000,00	446.800.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	446.800.000,00	446.800.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	173.806.700,00	173.806.700,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	119.659.200,00	119.659.200,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	9.050.000,00	9.050.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	1.669.000,00	1.669.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	108.940.200,00	108.940.200,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	54.147.500,00	54.147.500,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	21.534.000,00	21.534.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	20.015.000,00	20.015.000,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	12.598.500,00	12.598.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.300.000,00	22.300.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	22.300.000,00	22.300.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	22.300.000,00	22.300.000,00
1.3.02.10	Komputer	429.676.000,00	429.676.000,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	357.070.000,00	357.070.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	357.070.000,00	357.070.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	72.606.000,00	72.606.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	53.206.000,00	53.206.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	19.400.000,00	19.400.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	20.900.000,00	20.900.000,00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	20.900.000,00	20.900.000,00
1.3.02.15.04.0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	20.900.000,00	20.900.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(604.647.059,71)	(389.998.147,51)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(604.647.059,71)	(389.998.147,51)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(487.807.348,71)	(273.158.436,51)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(487.807.348,71)	(273.158.436,51)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(31.157.335,00)	(31.157.335,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(301.667,00)	(301.667,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(361.617,00)	(361.617,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(14.769.551,00)	(14.769.551,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(6.460.200,00)	(6.460.200,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(5.484.750,00)	(5.484.750,00)
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(3.779.550,00)	(3.779.550,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(943.333,00)	(943.333,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(943.333,00)	(943.333,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(84.042.377,00)	(84.042.377,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(65.505.416,00)	(65.505.416,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(12.878.628,00)	(12.878.628,00)
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(5.658.333,00)	(5.658.333,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(696.666,00)	(696.666,00)
1.3.07.01.15.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	(696.666,00)	(696.666,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	JUMLAH ASET TETAP	488.835.640,29	703.484.552,49
1.5	ASET LAINNYA	26.310.369,00	26.310.369,00
1.5.04	Aset Lain-lain	26.310.369,00	26.310.369,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	26.310.369,00	26.310.369,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	26.310.369,00	26.310.369,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	26.310.369,00	26.310.369,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	26.310.369,00	26.310.369,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	515.204.894,79	730.650.388,16
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	515.204.894,79	730.650.388,16
3.1	EKUITAS	515.204.894,79	730.650.388,16
3.1.01	Ekuitas	(5.614.564.057,21)	(6.145.377.305,84)
3.1.01.01	Ekuitas	730.650.388,16	913.393.114,72
3.1.01.01.01	Ekuitas	730.650.388,16	913.393.114,72
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	730.650.388,16	913.393.114,72
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(6.345.214.445,37)	(7.058.770.420,56)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(6.345.214.445,37)	(7.058.770.420,56)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(6.345.214.445,37)	(7.058.770.420,56)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.129.768.952,00	6.876.027.694,00
3.1.03.01	RK PPKD	6.129.768.952,00	6.876.027.694,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	6.129.768.952,00	6.876.027.694,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	6.129.768.952,00	6.876.027.694,00
	JUMLAH EKUITAS	515.204.894,79	730.650.388,16
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	515.204.894,79	730.650.388,16

Tanjungpinang, 19 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs.H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003